BAB II

Perkembangan Diplomasi Publik Jepang

Dalam bab ini akan dijelaskan perkembangan diplomasi pemerintah Jepang secara umum, dimulai dari latar belakang diplomasi publik Jepang secara umum pasca Perang Dunia II sampai saat ini. Berikutnya akan dijelaskan perkembangan diplomasi publik Jepang, mulai dari prioritas diplomasi Jepang berdasarkan *Fukuda Doctrine* beserta dengan bentuk-bentuk diplomasi publik Jepang.

A. Latar Belakang Diplomasi Publik Jepang

1. Pasca Perang Dunia II dan Masa Pemerintahan SCAP

Kekalahan Jepang dari pihak Sekutu pada Perang Dunia II yang ditandai dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 benar-benar membuat Jepang mengalami kehancuran dan penderitaan secara fisik maupun psikologis. Beberapa hari setelah bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki oleh pasukan Sekutu, Kaisar Hirohito selaku pemimpin Jepang pada siang hari tanggal 15 Agustus 1945 dalam pidato yang disebut *Gyokuon-Housou* (*Siaran Suara Kaisar*) mengumumkan penerimaan resmi Jepang atas syarat-syarat

kapitulasi sesuai dengan Deklarasi Postdam yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 1945 oleh Harry S Truman (Presiden Amerika Serikat), Winston Churchill (Perdana Menteri Britania Raya) dan Chiang Kai-Shek (Presiden Republik Tiongkok). Sebelum pidato tersebut Kaisar pada hari yang sama, pemerintah Jepang melalui *Radio Tokyo* (sekarang NHK—*Japan Broadcasting Corporation*) telah mengumumkan bahwa Jepang akan segera menerima Deklarasi Postdam dan telah mengirimkan berita keinginan Jepang untuk menyerah kepada Sekutu lewat pesan kabel yang dikirim ke Presiden Amerika Serikat Harry S Truman lewat misi diplomatik Swiss di Washington D.C.[1] Pada tanggal 2 September 1945, Jepang melalui Menteri Luar Negerinya Mamoru Shigemitsu menandatangani Dokumen Kapitulasi Jepang (*Japanese Instrument of Surrender*) di atas kapal USS Missouri yang menandai secara resmi menyerahnya pihak Jepang kepada pasukan Sekutu sekaligus resmi menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Pasca penandatangan Dokumen Kapitulasi oleh pihak Jepang, secara resmi pihak Sekutu melalui *Supreme Commander for the Allied Powers* (SCAP) yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur mengambil alih pemerintahan Jepang

---

[1] Joy Hakim, *A History of Us: War, Peace and all that Jazz*, Oxford University Press, London, 1995 hal. 112

selama tujuh tahun (1945-1952). SCAP juga merupakan pihak yang berperan besar dalam pembentukan konstitusi baru Jepang pasca perang, yang didalamnya memuat Pasal 9 yang tidak memberikan hak konstitusional bagi Jepang untuk memulai dan mengadakan aktivitas perang. Konstitusi baru ini disahkan tanggal 3 Mei 1947, dua tahun sejak menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Setahun sebelumnya, tepatnya 3 Mei 1946, SCAP mengadakan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (*International Military Tribunal for the Far East*) untuk mengadili para penjahat perang Jepang selama berlangsungnya Perang Dunia II, dimana lebih dari 5000 tersangka kejahatan perang diadili dan diputuskan bersalah, namun Kaisar beserta seluruh keluarga kekaisaran dan personil-personil Unit Penelitian Bakteriologis Kekaisaran Jepang; yang lebih dikenal dengan Unit 731, dibebaskan dari segala dakwaan meskipun terdapat bukti-bukti dakwaan pengadilan kepada kedua pihak tersebut. Kaisar beserta keluarganya, dianggap sebagai simbol spiritual dan persatuan rakyat Jepang sehingga SCAP menghapus segala dakwaan terhadap mereka.[2]

---

[2] J.E. Thomas, *Modern Japan*, Longman, New York, 1996, hal. 284–287

Selama kurang lebih tujuh tahun di bawah pemerintahan SCAP (1945-1952), Jepang berusaha bangkit kembali dengan melakukan berbagai reformasi politik, ekonomi dan pendidikan. Pencantuman Pasal 9 dalam Konstitusi Pasca Perang Jepang adalah langkah reformasi yang diprakarsai oleh SCAP untuk mencegah Jepang untuk tidak kembali menjadi negara militer seperti halnya yang terjadi pada Perang Dunia II lalu. Pasca Perang Dunia II usai, dunia dihadapkan kepada perang baru, yaitu perang ideologis antara Amerika Serikat yang demokratis dan Uni Soviet yang berpaham komunis. Masa perang ideologis ini dikenal dengan Perang Dingin. Amerika Serikat merasa khawatir dengan semakin meluasnya pengaruh komunis di Eropa; Eropa Timur khususnya dan Asia, terlebih setelah Republik Tiongkok pimpinan Kuomintang yang demokratis jatuh dan tersingkir ke Pulau Formosa (Taiwan) pada 1949, yang kemudian daratan Tiongkok dikuasai oleh Republik Rakyat Tiongkok yang komunis pimpinan Mao Ze-Dong.

Keadaan Jepang pasca Perang Dunia II yang di bawah pemerintahan SCAP dan dengan didukung oleh situasi politik negara-negara tetangganya yang masih berkutat dengan perang membuat Jepang pada masa ini tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan kegiatan diplomasi luar negerinya. Pada masa ini hampir

seluruh sektor pemerintahan ada dalam kontrol SCAP sehingga kegiatan diplomasi Jepang menjadi sangat terbatas.

2. Perang Korea dan Masa Pemerintahan Yoshida

Pecahnya Perang Korea (1950-1953) menjadi perang terbuka antara ideologi demokratis yang diwakili oleh Korea Selatan dengan dukungan Amerika Serikat dan ideologi komunis yang diwakili Korea Utara dengan dukungan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Perang Korea ternyata memberikan berkah tersendiri kepada Jepang, karena wilayah Jepang dijadikan basis logistik keperluan pasukan Sekutu selama berlangsungnya perang tersebut, sehingga menumbuhkan kembali kegiatan industri dan ekonomi Jepang. Perdana Menteri Jepang saat itu, Yoshida Shigeru, mengatakan bahwa pecahnya Perang Korea merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Jepang.[3] Selain kegiatan industri dan ekonomi Jepang tumbuh kembali untuk mendukung kebutuhan logistik pasukan Sekutu di Perang Korea, SCAP kemudian juga menjadikan Jepang sebagai basis utama untuk menghadapi dan menahan penyebaran pengaruh komunis di Asia, dari semula

[3] John P. Bowen, *The Gift of The Gods: the impact of the Korean War on Japan*, Bowen, 1984, hal. 6-7

"menghukum" Jepang dengan demiliterisasi dan demokratisasi sebagai pihak yang kalah perang menjadi sekutu utama untuk melawan komunisme.

Pada masa kepemimpinan Yoshida inilah Jepang kemudian bangkit dari keterpurukan pasca Perang Dunia II. Kebijakan-kebijakan yang diambil Yoshida, mengutamakan kepada pemulihan ekonomi dan mengorbankan kemandirian negara dalam melakukan urusan luar negerinya dengan termasuk mempercayakan perlindungan militer Jepang kepada Amerika Serikat. Kebijakan Yoshida yang mengutamakan prioritas nasional kepada perkembangan ekonomi dan disaat yang sama menjaga sikap *low profile* di bidang diplomatik tersebut kemudian dikenal dengan Doktrin Yoshida (*Yoshida Dokutorin—Yoshida Doctrine*).[4]

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat di bawah kepemimpinan Yoshida juga mengantarkan Jepang untuk turut serta menandatangani *Colombo Plan* pada 1954. *Colombo Plan* merupakan organisasi regional antar pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan sosial di negara-negara kawasan Asia-Pasifik. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan *Colombo Plan*, di tahun yang sama pemerintah Jepang lalu meluncurkan program

---

[4] Mark Beeson, *Japan and Southeast Asia: The Lineaments of Quasi-Hegemony*, 1998, hal. 3-4

Official Development Assistance (ODA) yang dibawah wewenang Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA). Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang di seluruh dunia melalui bantuan dana, teknis, sumber daya manusia, maupun bantuan-bantuan lainnya.[5]

Perang Korea dan masa pemerintahan Yoshida menjadi tonggak awal kemandirian Jepang dalam mengelola hubungan luar negerinya. *Yoshida Doctrine* menjadi pedoman Jepang dalam melakukan hubungan luar negerinya, terutama dalam berdiplomasi dengan negara lain. *Yoshida Doctrine* membuat karakter diplomasi Jepang berorientasi kepada ekonomi, utamanya dalam usaha Jepang untuk menghapus citra Jepang sebagai negara imperialis; Yoshida ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang telah berubah menjadi negara pasifis.

3. Diplomasi Jepang Pasca Yoshida

Tingginya pertumbuhan ekonomi Jepang melalui kebijakan Yoshida yang memprioritaskan ekonomi membuat Jepang kembali menjadi negara yang besar dan disegani, kali ini dalam bidang ekonomi. Jepang bahkan selepas Perang Korea

---

[5] Review *of Japan's Official Development Assistance Charter (Provisional translation)*, Ministry of Foreign Affairs Japan, http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/review0303.html diakses pada 14 April 2014

berakhir tetap dijadikan sebagai basis utama pertahanan melawan komunis di Asia oleh Amerika Serikat dan sekutunya (Blok Barat). Infrastruktur yang hancur pasca perang pulih kembali dan kepercayaan internasional kepada Jepang pun membaik. Tahun 1963 Jepang bergabung ke dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *International Monetary Fund* (IMF), lalu setahun setelahnya bergabung ke dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Pada tahun 1964 kota Tokyo terpilih sebagai tuan rumah perhelatan akbar Olimpiade Musim Panas; mengungguli Detroit (Amerika Serikat), Wina (Austria) dan Brussel (Belgia), sekaligus menjadikan Jepang sebagai negara pertama di Asia yang menyelenggarakan kompetisi olahraga empat tahunan terbesar di dunia tersebut.[6] Pada tahun 1968 pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi bahkan melampaui capaian Jerman Barat, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Di tahun fiskal 1968, GNP Jepang mencapai 152 miliar dolar AS. Pencapaian ini sering disebut dengan *economic*

[6] GamesBids—An Authoritative Review of Olympics Bid Business, http://www.gamesbids.com/eng/past.html diakses pada 14 April 2014

miracle, dan bagi rakyat Jepang sendiri tahun capaian ini sangat istimewa karena terjadi bertepatan dengan peringatan 100 tahun Restorasi Meiji (1868).[7]

Jepang yang memprioritaskan kepentingan ekonomi sebagai kepentingan nasional yang utama ternyata berdampak kepada citra Jepang sendiri sebagai sebuah negara. Di samping dikenal secara positif sebagai negara dengan ekonomi yang maju dan sebagai raksasa ekonomi Asia, di saat yang sama Jepang juga dikenal secara negatif dengan sebutan *economic animal*. Kerjasama yang dilakukan Jepang kepada negara-negara lain yang menjadi mitra kerjasamanya dipandang secara ekonomi hanya menguntungkan Jepang semata. Citra ini diperkuat dengan masa lalu Jepang sebagai negara penjajah pada Perang Dunia II yang kejam Pada tahun 1973-1974, terjadi protes besar-besaran terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, saat PM Tanaka berkunjung ke Jakarta pada 14-17 Januari 1974 terjadi demonstrasi mahasiswa berdarah di Jakarta yang kemudian disebut dengan *Malapetaka Limabelas Januari* atau populer dengan sebutan Malari. Peristiwa Malari dapat juga dilihat sebagai konflik kepentingan Amerika Serikat dan Jepang di Indonesia yang

---

[7] Koichi Hamada, "Japan 1968: A Reflection Point during the Era of the Economic Miracle", Center Discusiion Paper No. 764, Yale University, 1996, hal. 5

dimunculkan oleh tokoh-tokoh intelektual dan mahasiswa Indonesia yang pro Amerika Serikat dan kurang menyukai peran ekonomi Jepang yang semakin besar di Indonesia, antara lain diwujudkan dengan populernya julukan *economic animal* yang ditujukan kepada Jepang.[8]

Pada tahun 1977 Perdana Menteri Takeo Fukuda sebagai Kepala Pemerintahan Jepang saat itu meluncurkan kebijakan luar negeri yang berbasis budaya dan ekonomi, yang ia ungkapkan saat melakukan kunjungan ke Manila. Pada kunjungannya ke Manila tersebut, dalam pidato resminya Fukuda berulang kali mengajak pemerintah negara-negara yang ia kunjungi untuk lebih melakukan hubungan kerjasama antar negara yang lebih lanjut, dengan mengutamakan saling pengertian dan pemahaman dari hati ke hati (*heart to heart*) antara rakyat Jepang dan Asia Tenggara.[9] Dari pernyataan yang diungkapkan pada pidato Perdana Menteri Fukuda tersebut, diketahui bahwa Jepang ingin membangun hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan berdasar pada konsep

---

[8] Abdul Irsan, op. cit., hal. 172

[9] Sueo Sudo, *The International Relations of Japan and Southeast Asia: Forging a New Regionalism*, Routledge, London, 2002, hal. 125-127

heart-to-heart. Konsep *heart to heart* ini secara langsung sudah lebih dahulu terwujud dengan didirikannya *Japan Foundation* pada tahun 1972.

Dalam pesan yang disampaikannya, dapat terlihat bahwa Fukuda ingin agar target utama kebijakan luar negeri Jepang di Asia Tenggara adalah masyarakat Asia Tenggara itu sendiri. Hal ini sangatlah erat berkaitan dengan diplomasi publik. Fukuda juga mengungkapkan bahwa dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pertukaran budaya adalah faktor penting dan secara implisit juga disebutkan bahwa antara masyarakat Jepang dan masyarakat Asia Tenggara pada dasarnya memiliki tradisi yang sama sebagai orang Asia. Dalam pidatonya di Manila yang kemudian dikenal dengan Doktrin Fukuda, Fukuda menjelaskan posisi Jepang dalam hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara. Jepang ingin menunjukkan diri bahwa Jepang adalah teman dan berusaha untuk meningkatkan kerja sama yang lebih luas dengan Asia Tenggara, tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi, namun juga pada bidang sosial dan budaya.

Perdana Menteri Takeshita pada 5 Mei 1989 menunjukkan komitmennya pada kerja sama di bidang kebudayaan.[10] Dalam agenda kebijakan luar negerinya,

---

[10] Ibid, hal. 129

ia menyebut konsep yang disebut dengan *International Cooperation Initiative* yang berdasarkan kepada tiga pilar. Ketiga pilar tersbut adalah penguatan kerja sama untuk perdamaian, perluasan lingkup ODA, dan penguatan pertukaran budaya internasional. Takeshita berpendapat melalui tiga pilar ini pertukaran budaya dapat menjadi sebuah arena untuk orang-orang dari berbagai negara untuk saling bertukar pikiran, nilai dan sistem untuk saling menghormati dan menumbuhkan rasa kesepahaman sebagai umat manusia. Komunitas internasional merupakan sesuatu yang dapat dibangun dengan meningkatkan pertukaran pemikiran dari berbagai kebudayaan yang berbeda,

Pada tahun 1997, Perdana Menteri Hashimoto juga menekankan kembali pentingnya budaya dalam hubungan Jepang dengan negara lain.[11] Dalam konteks hubungan Jepang dan ASEAN, Hashimoto menjelaskan ada tiga bidang kerja sama Jepang dan ASEAN yang harus diperkuat. Ketiga bidang tersebut yang pertama adalah memperluas dan memperbanyak pertukaran antara Jepang dan ASEAN, tidak hanya pada tingkat elit politik, namun juga pada tingkat masyarakat umum. Kedua, meningkatkan kesepahaman satu sama lain untuk memperluas kerja sama

[11] Ibid, hal. 133-137

kebudayaan. Ketiga, saling berbagi nilai, kebijaksanaan dan pengalaman dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas internasional. Hashimoto dalam tiga poin bidangnya tersebut terlihat ingin menekankan bahwa diplomasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan luar negeri Jepang. Pada bidang yang pertama, program pertukaran masyarakat pada semua level dapat dipahami sebagai sarana untuk berbagi pendapat dan membangun pemahaman bersama yang tidak hanya bersifat resmi, namun juga tidak resmi yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Pada bidang kedua, berkaitan dengan kerja sama yang didasarkan pada diplomasi budaya, Hashimoto menjelaskan bahwa idenya dengan menciptakan misi kebudayaan multinasional. Bidang yang terakhir adalah tentang kontribusi yang dapat diberikan dalam mengatasi permasalahan dunia dengan berbagi dan saling membantu satu sama lain yang tidak hanya berupa hal-hal yang bersifat materi seperti bantuan ekonomi, namun juga hal yang bersifat immaterial seperti nilai sosial dan kebudayaan.

Perdana Menteri Koizumi pada pidatonya di Singapura tahun 2002 menegaskan sebuah konsep tentang komunitas yang bergerak secara bersama.[12]

---

[12] http://japan.kantei.go.jp/koizumispeech/2002/01/14speech_e.html diakses pada 16 April 2014

Inti dari konsep ini adalah dengan memperluas kerja sama di Asia Timur yang didasarkan kepada kerja sama Jepang dan ASEAN. Dalam memperluas kerja sama ini, didasarkan pada pendapat untuk menciptakan harmonisasi hubungan Jepang dan negara di Asia Tenggara dari sudut pandang sejarah, kebudayaan, etnik dan keanekaragaman tradisi. Untuk mewujudkan idenya ini, Koizumi mengusulkan lima inisiatif. Kelima inisiatif tersebut yaitu fokus kepada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pertukaran di segala bidang, membangun dan memperkuat *Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership*, meningkatkan pertemuan untuk membahas pembangunan di Asia, dan kerja sama bidang keamanan, termasuk di dalamnya adalah isu terorisme dan kejahatan transnasional.

Inisiatif Koizumi tersebut dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Inisiatif pertama dan kedua berkaitan dengan pendekatan budaya. Inisiatif ketiga dan keempat berkaitan dengan pendekatan ekonomi, dan inisiatif terakhir lebih kepada pendekatan keamanan. Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia, Koizumi mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama antar universitas, dan untuk menstimulasi pertukaran di segala bidang, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan pertukaran budaya dan intelektual serta

memperkuat jaringan peneliti dan lembaga penelitian Jepang dan negara ASEAN. Secara khusus, Koizumi memberikan contoh dengan menyebutkan peran dari budaya pop Jepang. Ia mengatakan bahwa budaya pop Jepang telah menjadi budaya pop bagi anak muda Singapura, dan sebaliknya, anak muda Singapura dapat mengajarkan bahasa Inggris kepada anak muda Jepang. Koizumi menyebutkan hal ini sebagai sebuah pertukaran yang saling menguntungkan antar-anak muda kedua negara.

Pada bulan Juni tahun 2009, Perdana Menteri Taro Aso memberikan pidato berjudul "*Japan's Diplomacy: Ensuring Security and Prosperity*". [13] Ia mengungkapkan dalam pidatonya bahwa Jepang harus mengirimkan pesan-pesan *soft power*-nya kepada dunia melalui nilai-nilai sosial dan budaya Jepang, pengajaran bahasa Jepang sebagai bahasa asing, serta pengiriman sekolah untuk rakyat Jepang ke luar negeri. Aso juga mengatakan bahwa salah satu potensi dari *soft power* Jepang adalah animasi Jepang (*anime*), komik Jepang (*manga*), dan bentuk hiburan yang lain, seperti film dan gaya hidup modern Jepang yang sering disebut dengan istilah *Cool Japan*. Potensi yang lain adalah etos kerja Jepang yang

[13] http://japan.kantei.go.jp/asospeech/2009/06/30speech_e.html diakses pada 16 April 2014

mampu membangun kembali Jepang dari negara yang terpuruk pasca Perang Dunia II menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang maju. Jepang juga perlu memperkenalkan kepada dunia dan masyarakat Jepang sendiri tentang orang-orang Jepang yang memiliki kontribusi dalam dunia internasional, seperti atlet olahraga dan peran para ahli Jepang dalam penyelesaian masalah internasional.

Secara khusus, Aso menyampaikan contoh seperti pengacara perempuan dari Jepang yang telah berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Kamboja, bekerja sama dengan tim dari Kamboja. Hal ini adalah sebagai bentuk kontribusi warga negara Jepang secara individu yang secara tidak langsung membantu memperkuat diplomasi Jepang di luar negeri dalam konteks membantu pembentukan citra positif tentang Jepang. Bahasa Jepang juga menjadi hal yang menjadi sorotan oleh Aso. Banyak kalangan dari masyarakat internasional tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang, berdasarkan pada ketertarikan mereka terhadap *Cool Japan*. Dalam kasus ini, Aso menekankan bahwa pertukaran pelajar dan mahasiswa serta kerja sama antara universitas di Jepang dan universitas di negara lain harus ditingkatkan.

Pesan kedua adalah penguatan ODA. ODA sejak awal mula pencanangannya telah menjadi alat utama diplomasi Jepang. Pada tahun 2008,

Jepang menempati posisi kelima negara pendonor terbesar untuk program ODA setelah Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Prancis. Pesan ketiga oleh Aso berkaitan dengan pertukaran ahli dan lembaga *think-tank*. Pertukaran ini tidak hanya menjadi bagian dari alat diplomasi, khususnya untuk membangun kerja sama antar peneliti dan akademisi.

Pada pemerintahan Perdana Menteri Hatoyama, pada 16 September 2009 Hatoyama mengumumkan prinsip dasar pemerintahannya yang akan meningkatkan peran Jepang dalam keikutsertaannya di komunitas internasional.

> *Japan will contribute to the well-being of the international community through not only activities in the economic field but also those in the areas of the environment, peace, culture, science and technology, creating a country that is trusted by the international community. We must build a country and a society whose people can once again hold pride in being Japanese. In the twenty-first century, the role that Japan can play between the two great powers of United States and China, and indeed the role that the Japanese people and Japanese culture can play in international community, are certainly quite significant.*[14]

Mulai dari Doktrin Fukuda sampai dengan di masa pemerintahan Hatoyama, Jepang berusaha untuk memainkan peran dalam komunitas

[14] http://japan.kantei.go.jp/hatoyama/statement/200909/16principles_e.html diakses pada 16 April 2014

internasional. Konsep dasar yang ingin dibangun adalah membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap Jepang. Doktrin Fukuda yang secara khusus dapat disebut sebagai *heart to heart relations* adalah upaya awal yang dibangun oleh Jepang dalam tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Asia Tenggara sebagai mitra di segala bidang. Hampir semua kebijakan luar negeri yang diambil selalu melibatkan diplomasi kebudayaan dan keterlibatan publik dala proses diplomasi. Secara jelas juga disampaikan bahwa budaya pop Jepang adalah bagian dan digunakan sebagai alat pendukung diplomasi Jepang. Taro Aso bahka menyebutnya sebagai bagian dari *soft power* Jepang. Pada pemerintahan Hatoyama disebutkan bahwa dalam prinsip dasar pemerintahannya tetap mengacu kepada keterlibatan masyarakat dan budaya Jepang yang dianggap dapat memainkan peran yang signifikan dalam hubungannya dengan luar negeri.

Dalam pidatonya di pertemuan dengan Diet ke-174 pada 29 Januari 2010, Hatoyama menjelaskan tentang pentingnya budaya dalam hubungan luar negeri Jepang.[15] Terdapat dua poin utama tentang peran budaya tersebut; *pertama*, Jepang

---

[15] *174th Diet Meeting Report, the Government of Japan,* http://japan.kantei.go.jp/hatoyama/statement/201001/29siseihousin_e.html diakses pada 16 April 2014

dapat memperkenalkan kebudayaannya kepada dunia. Hal ini didasarkan pada sudut pandang sejarah Jepang sebagai sebuah bangsa yang membangun kekayaan budayanya dengan cara asimilasi berbagai macam kebudayaan dan teknologi yang dibawa dari benua Asia dan semenanjung Korea oleh orang-orang zaman dahulu yang menyeberangi lautan yang memisahkan kepulauan Jepang dan daratan utama benua Asia dan kemudian mencoba menggabungkannya dengan budaya lokal sehingga tercipta kebudayaan yang unik. Dalam konteks ini, Jepang terlihat sebagai sebuah negara dengan kemampuan untuk membangun nilai yang baru dari pengalamannya mengasimilasikan dan mengkolaborasikan budaya yang tidak hanya berasal dari Asia, namun juga yang berasal dari Barat pada masa Meiji, yang dikenal dengan istilah *wakon-yosai* (Semangat Jepang, Belajar Barat).

Kedua, budaya dapat digunakan untuk membuat Jepang semakin dipercaya oleh negara-negara lain di dunia dengan menawarkan konsep Komunitas Asia Timur (*East Asian Community*), yang bukan menjadi sebuah komunitas regional untuk membangun blok ekonomi, melainkan komunitas regional yang berdasarkan pada hubungan tradisi dan budaya.

> *I aspire to fashion a community of life sustenance and culture in Asia that develops our history of cultural exchange spanning several millennia and intensifies our cooperation to ensure this*

sustenance of life. It was this conviction that brought me to propose the initiative.16

Sebagai implementasi dari tujuan di atas, Hatoyama menekankan pada pentingnya pertukaran budaya dan masyarakat. Jepang juga dapat memainkan peranan penting dalam penanganan isu global di kawasan, seperti masalah pemanasan global, gempa bumi, flu burung, dan ancaman bencana lainnya di satu sisi. Di sisi yang lain, melalui aktivitas dalam peran yang dilakukannya tersebut Jepang juga dapat menyebarkan nilai-nilai budayanya.

Menteri Luar Negeri Okada juga mejelaskan tentang pentingnya kepercayaan; tidak hanya dari negara lain, namun juga dari masyarakat Jepang sendiri.

I have emphasized the need for foreign policy supported by the understanding and trust of the nation. It is only with the understanding and trust of the nation that our conduct of foreign policy can have the strength.[17]

Pernyataan di atas menekankan bahwa untuk memperkuat kebijakan luar negeri, dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Okada juga mengungkapkan bahwa publik dan aktor non-pemerintah lainnya juga dapat

---

[16] *174th Diet Meeting Report, the Government of Japan,* loc. cit..

[17] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/okada/speech1001.html diakses pada 16 April 2014

memainkan peran untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terkait dengan hubungan luar negeri Jepang. Ia mengatakan bahwa hubungan luar negeri tidak hanya menjadi sesuatu yang menjadi urusan pemerintah, melainkan juga urusan masyarakat dalam konteks yang lebih luas, termasuk di dalamnya LSM, pemerintah lokal, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, serta individu yang terlibat di dalam kegiatan pertukaran budaya.

Sebelumnya pada tahun 1997, Menteri Luar Negeri Yuhihiko Ikeda menyatakan tentang pentingnya aktivitas pertukaran budaya dan dukungan dari publik.[18] Dalam pidatonya pada pertemuan dengan Diet ke-140, ia mengatakan bahwa Jepang telah membangun kerja sama kebudayaan, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam implementasinya, ia mencatat bahwa sangat penting untuk membangun kerja sama serupa yang dibangun oleh pihak swasta dan juga memberikan perhatian penuh pada pembangunan opini publik. Pada tahun 1998, Menteri Luar Negeri Keizo Obuchi pada pertemuan Diet ke-142 juga mengatakan bahwa diplomasi Jepang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari publik.[19] Bahkan pada akhir pidatonya, ia mengatakan "*a diplomacy that moves hand in hand with*

---

[18] http://www.mofa.go.jp/announce/announce/archive_3/diet.html diakses pada 16 April 2014

[19] http://www.mofa.go.jp/announce/announce/archive_3/142nd.html diakses pada 16 April 2014

the people" untuk memperkuat pernyataannya. Ia mengutip pendapat dari Profesor Kan'ichi Asakawa dari Universitas Yale yang berpendapat bahwa satu hal yang paling penting dan menentukan hubungan Jepang dengan negara lain adalah tentang pemahaman masyarakat Jepang sendiri terhadap kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, peran masyarakat di dalam negeri adalah sangat penting karena dengan pemahaman mereka akan hubungan internasional akan dapat menjadi dukungan terhadap kebijakan luar negeri Jepang, dan secara tidak langsung masyarakat Jepang yang melakukan perjalanan keluar negeri untuk tujuan wisata maupun tujuan yang lain sebenarnya dapat berperan untuk mempromosikan hal-hal tentang Jepang kepada masyarakat di negara lain.

Dalam pidatonya yang berjudul "*Japan's Leadership for the Future of Asia*" di tahun 1999, Menteri Luar Negeri Masahiko Koumura mengatakan tentang pentingnya budaya di Asia.

> *I am convinced that if we can bring together the wisdom of Asian countries, which, while sharing the characteristic of diversity, are bonded by a strong sense of community, we will be able to build a brighter future.*[20]

[20] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/koumura/address9906.html diakses pada 16 April 2014

Pada tahun 2001, Menteri Luar Negeri Yohei Kono dalam pidatonya di depan pertemuan dengan Diet ke-151 juga memperkuat pendapat-pendapat para pendahulunya tentang pentingnya hubungan budaya dalam konteks diplomasi budaya untuk membangun kepercayaan.

> *In building trust among people and among countries from a long-term perspective, we must endeavor to find common values and forge a path towards mutual understanding, while maintaining a deep respect for the cultures and histories developed by othe people and for our differences. In this regard, the promotion of dialogue, for example, among different religions or different people is of as much significance as poverty reduction in achieving world peace.*[21]

Untuk mengimplementasikan tujuan dalam pidatonya di atas, Kono menekankan pentingnya diplomasi budaya dan memajukan dialog antar-peradaban. Ia mengatakan bahwa hubungan budaya dapat berperan sebagai kekuatan yang menggerakkan pembentukan masyarakat dunia yang damai dan dinamis. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Jepang juga memainkan peran penting di dalamnya, seperti meningkatkan kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa serta membuka kesempatan yang lebih luas pada program pertukaran masyarakat.

---

[21] http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2001/1/0131-3.html diakses pada 16 April 2014

Menteri Luar Negeri Yoriko Kawaguchi dalam pertemuan dengan Diet ke-154 tahun 2002 mengatakan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi ekonomi pasar dan perdagangan bebas merupakan hal yang sangat penting bagi Jepang.[22] Pidatonya tersebut dipengaruhi oleh kondisi internasional saat itu yang masih dalam suasana pasca serangan 9/11 di Amerika Serikat. Namun Kawaguchi juga mengatakan tentang pentingnya kesepahaman bersama antar-kebudayaan dan peradaban di dunia. Dialog di antara mereka sudah seharusnya membangun sebuah masyarakat dunia yang di dalamnya dapat hidup dengan damai dan menerima perbedaan satu sama lain, bukan untuk konflik. Pada pertemuan dengan Diet selanjutnya, yaitu pertemuan ke-155, Kawaguchi menekankan kembali pendapat para pendahulunya, yaitu pentingnya diplomasi budaya. Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa Jepang dalam melanjutkan usahanya untuk mendukung perlindungan terhadap warisan budaya di negara berkembang ebagai salah satu bagian dari usaha untuk memajukan kerja sama budaya dan sekaligus menjembatani dialog antar-peradaban. [23] Sebagai implementasinya, Jepang mengundang intelektual dan masyarakat dari luar negeri untuk dua tujuan utama,

---

[22] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/kawaguchi/speech0204.html diakses pada 16 April 2014

[23] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/kawaguchi/speech040119.html diakses pada 16 April 2014

yaitu untuk memfasilitasi kegiatan untuk mencapai kesepahaman bersama dan membantu merevitalisasi masyarakat Jepang sendiri.

Menteri Luar Negeri Nobutaka Machimura pada pertemuan dengan Diet ke-162 tahun 2005 secara jelas mengumumkan tentang proyek untuk menarik perhatian masyarakat internasional kepada Jepang.[24] Dalam konteks globalisasi, Jepang juga mengambil bagian dan menggunakannya sebagai alat untuk mempromosikan Jepang di luar negeri. Ia mengatakan bahwa pemerintah Jepang melakukan proyek untuk mempromosikan kebijakan, budaya, nilai, keunikan, dan aspek lain di luar negeri secara aktif dan efisien, serta menyusun aspek-aspek tersebut sebagai alat berdiplomasi yang lebih luas.

Kebijakan pemerintah Jepang yang sangat jelas berkaitan dengan diplomasi budaya, terutama menyangkut aspek budaya pop Jepang adalah pada masa Menteri Luar Negeri Taro Aso. Dalam pidatonya di *Digital Hollywood University* yang berjudul "*A New Look at Cultural Diplomacy: A Call to Japan's Cultural Practitioners*" di tahun 2006, Aso secara gamblang menjelaskan pendapatnya tentang diplomasi budaya Jepang.[25] Terdapat lima hal penting yang

---

[24] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/machimura/speech0501.html diakses pada 16 April 2014

[25] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html diakses pada 16 April 2014

disampaikan di dalam pidatonya tersebut, utamanya mengenai diplomasi budaya Jepang. *Pertama*, tentang budaya pop Jepang seperti *manga* dan *anime*, sebagai budaya baru di Jepang yang memperlihatkan perjuangan modern budaya Jepang menyaingi budaya Amerika. Ia lalu mencontohkan *Popeye*, kartun Amerika Serikat yang mempengaruhi banyak orang Jepang pasca Perang Dunia II. Namun Jepang lalu memiliki karakter kartunnya sendiri yang didasarkan pada nilai dan budaya Jepang yang tentunya merupakan hasil karya orang Jepang sendiri, seperti *Astro Boy* dan *Doraemon*.

Kedua, tentang kekuatan tidak terlihat yang dimiliki oleh Jepang. Peran Jepang dalam melindungi warisan budayanya adalah contoh tepat bagi negara lain untuk melakukan hal serupa, melakukan perlindungan terhadap warisan budaya negerinya. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan oleh Jepang untuk melindungi warisan budaya dan tradisinya dapat menjadi model yang bagus untuk diikuti oleh negara lain. Hal ini dapat digunakan oleh Jepang sebagai salah satu lat diplomasi budaya.

Ketiga, adalah tentang materi diplomasi budaya Jepang. Terdapat dua materi diplomasi budaya yang diungkapkan oleh Aso, yaitu budaya tradisional dan budaya pop. Masing-masing budaya memiliki peran dan tujuan sendiri-sendiri di

dalam aktivitas diplomasi publik Jepang. Upacara minum teh, pementasan *kabuki*, *origami*, kaligrafi dan lain sebagainya membawa nilai dan penghargaan terhadap tingginya budaya masyarakat Jepang. Di sisi lain budaya pop juga membawa maknanya sendiri: atraktif, menarik, lucu dan menghibur. Budaya pop dapat memainkan peran sebagai instrumen untuk mengundang atau menarik orang dari negara lain, khususnya generasi muda untuk belajar lebih banyak tentang Jepang.

Keempat, berkaitan dengan *brand* Jepang. Budaya pop dapat digunakan untuk meningkatkan citra *brand* produk-produk Jepang di negara lain. Walaupun dalam pidatonya tersebut Aso tidak secara jelas mengungkapkan *brand* seperti apa yang ia maksud, namun hal itu mengarah kepada *brand* produk-produk Jepang yang telah terkenal dan memiliki pasar yang kuat di mancanegara.

Kelima, adalah tentang siaran media Jepang serta keterlibatan masyarakat. Ia mengatakan Jepang harus memiliki siaran media berbahasa Inggris yang kuat untuk memperkenalkan Jepang ke seluruh dunia. Siaran media yang seperti ini tidak seharusnya berorientasi domestik, namun harus berorientasi internasional. Hal ini dpaat diwujudkan dengan memanfaatkan saluran media *NHK International* sebagai *role model* bagi siaran-siaran media lain di Jepang. Proses ini seperti yang ia

ungkapkan tentunya juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dan juga sektor swasta.

Pada pidatonya di Konferensi Internasional Nikkei bulan Mei 2006 yang membahas tentang masa depan Asia pada abad ke-21, Aso menekankan pentingnya pembangunan jaringan komunitas Asia.[26] Kawasan Asia memiliki masa depan yang cerah dan untuk merealisasikannya harus dibentuk suatu jaringan komunitas, termasuk di dalamnya jaringan antar peneliti dan masyarakat umum. Dengan jalan ini, maka komunitas masyarakat dapat membangun kebijakan bersama dan berusaha untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan bersama-sama. Dari sini dapat dilihat bahwa Aso juga menekankan betapa pentingnya keterlibatan aktor non-pemerintah dalam hubungan internasional Jepang.

Pada kesempatan yang lain, ketika berbicara di depan seminar di *Japan Institute of International Affairs*, ia menjelaskan bahwa Jepang sedang berada dalam perkembangan untuk memperluas diplomasinya melalui dua jalan.[27] Pertama adalah diplomasi yang berorientasi pada nilai sosial, dan yang kedua adalah diplomasi yang diarahkan pada isu kebebasan dan kemakmuran. Untuk poin

---

[26] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0605-2.html diakses pada 16 April 2014

[27] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html diakses pada 16 April 2014

pertama, Aso menjelaskan bahwa nilai-nilai universal seperti demokrasi, HAM, aturan hukum dan ekonomi pasar merupakan nilai yang seharusnya turut disebarkan. Sedangkan berkaitan dengan poin kedua, program pertukaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang pada dasarnya dapat membantu mempromosikan nilai demokrasi dan kemakmuran ekonomi Jepang.

Di sisi lain, Jepang juga memiliki kesempatan untuk menyebarluaskan nilainya melalui diplomasi budaya. Ia mengambil contoh tentang pembentukan *Manggha Centre of Japanese Arts* di Krakow, Polandia. Pembangunan pusat kajian ini memiliki dua arti : *pertama*, hal ini menunjukkan tentang ketertarikan masyarakat Polandia untuk membaca dan mempelajari *manga* Jepang. *Kedua*, hal ini memberikan kesempatan untuk menyebarkan nilai-nilai Jepang melalui *manga*.

Aso juga menjelaskan pendapatnya tentang *the dreams of Japan's diplomacy*. Ia mengatakan bahwa Jepang harus dapat memainkan diplomasi yang proaktif dalam konteks untuk memperkuat kemampuannya dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi yang ada. Hal ini penting sekali terutama berkaitan dengan informasi yang memuat pengetahuan tentang bagaimana negara lain mengenal Jepang. Di sisi lain, ia juga menyebutkan tentang peran budaya pop Jepang dalam proses ini, yaitu dengan cara meningkatkan keinginan masyarakat di

seluruh dunia untuk belajar bahasa dan budaya Jepang, serta melalui media ini, budaya Jepang dapat dperkenalkan.[28]

Pada kesempatan yang lain, Aso juga berbicara tentang *physcological infrastructure* diplomasi Jepang. Hal ini berarti Jepang berusaha untuk menggunakan pendekatan psikologi dalam diplomasinya melalui budaya untuk mendapatkan kesan positif dan menarik perhatian masyarakat di negara lain untuk lebih mengenal dan mempelajari budaya Jepang. Ia juga mengatakan bahwa di masa mendatang, diplomasi Jepang akan bersifat *all Japan diplomacy* yang berarti diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga aktor di luar pemerintah. Dengan kata lain, diplomasi yang melibatkan segenap bangsa Jepang serta potensi yang dimilikinya.[29]

Penggunaan konsep diplomasi publik untuk menandai peran masyarakat, terutama dalam program diplomasi budaya dimulai pada masa Menteri Luar Negeri Masahiko Koumura. Pada pertemuan dengan Diet ke-169 pada tahun 2008, ia mengatakan pentingnya diplomasi publik yang proaktif untuk meningkatkan

---

[28] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0701.html diakses pada 16 April 2014

[29] http://www.mofa.go.jp/policy/pillar/address0703.html diakses pada 16 April 2014

kepercayaan dan pemahaman negara lain kepada Jepang dan untuk meningkatkan peran serta Jepang meningkatkan perdamaian dunia.

> *In my remarks thus far I have overviewed Japan's foreign policies, including notably our efforts to create a peaceful world. Increasing other countries' trust and understanding of Japan contributes to the smooth advancement of our diplomatic policies. For this reason, Japan will continue to engage in the strategic and proactive public diplomacy regarding Japan's points of appeal and Japan's foreign policies. We will also endeavor to increase the number of students of the Japanese language and to promote intellectual exchanges and other exchanges at the people-to-people level.*[30]

Komitmen pada diplomasi publik ini juga dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Menteri Luar Negeri Hirofumi Nakasone. Pada pertemuan dengan Diet ke-171 pada awal tahun 2009, ia mengatakan bahwa kepercayaan dan kesepahaman merupakan orientasi dasar dari kebijakan luar negeri Jepang. Untuk mempromosikan dan meningkatkan kepercayaan dan kesepahaman bersama antara Jepang dan negara lain, maka peran budaya dalam diplomasi publik berada pada tingkat kepentingan tertinggi. Ia mengatakan bahwa Jepang akan menggunakan strategi dengan mengikatkan diri pada usaha *public relations* terkait dengan masalah budaya, baik budaya tradisional maupun budaya pop. Kebijakan ini tidak

---

[30] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/koumura/speech0801.html diakses pada 16 April 2014

hanya ditujukan kepada masyarakat di luar negeri, namun juga pada masyarakat domestic. Diplomasi bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, dan ini berarti menempatkan kehormatan negara dan bangsa, serta warga negara dapat memegang kebanggan tersebut menjadi prioritas utama.[31]

Pemerintahan Naoto Kan juga mengharapkan peran serta masyarakat Jepang secara umum untuk mendukung dan berpartisipasi dalam hubungan luar negeri Jepang.[32] Secara khusus dalam pertemuan dengan Diet ke-176 pada 1 Oktober 2010, Kan memberikan penekanan pada bagian pidatonya menyangkut tentang hubungan luar negeri Jepang dalam aktif berdiplomasi membuka negara dan masa depan (*implementing active diplomacy to open up the country and build the future*). Kan mengatakan bahwa dalam situasi dunia yang saat itu masih terkena imbas krisis ekonomi global yang membawa dampak yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang, maka dibutuhkan persatuan dan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Jepang untuk saling membantu dan terlibat dalam diplomasi yang aktif. Diplomasi yang aktif tersebut dapat dicapai oleh Jepang

---

[31] http://www.mofa.go.jp/announce/fm/nakasone/speech0901.html diakses pada 16 April 2014

[32] http://japan.kantei.go.jp/kan/statement/201010/01syosin_e.html diakses pada 16 April 2014

dengan meningkatkan kontribusi Jepang kepada komunitas internasional dengan membantu memberikan banyak solusi pada berbagai permasalahan internasional.

Citra Jepang sebagai negara pasifis berorientasi ekonomi yang dibangun oleh Yoshida melalui *Yoshida Doctrine* membawa keuntungan besar bagi Jepang dan kembali menjadikan Jepang sebagai negara yang disegani dunia, kali ini dalam bidang ekonomi. Namun, ekonomi yang dijadikan sebagai pedoman utama menjadikan citra Jepang juga menjadi buruk, terutama di negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Jepang dianggap hanya mengejar keuntungan ekonomi semata di negara-negara berkembang, sehingga Jepang sempat dijuluki *economics animal*. Peristiwa Malari di Jakarta menjadi salah satu sebab Jepang pada pemerintahan Takeo Fukuda tahun 1977 akhirnya mengubah orientasi diplomasi luar negerinya yang tadinya hanya ekonomi menjadi ekonomi dan budaya. Fukuda sendiri saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada 1972 juga menjadi pihak sentral dalam pendirian *Japan Foundations*. *Fukuda Doctrine* yang mengedepankan konsep *heart-to-heart relations* menjadi pedoman hubungan dan diplomasi luar negeri Jepang pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya setelah Fukuda sampai saat ini.

B. Perkembangan Diplomasi Publik Jepang

1. Proritas Kepada *Soft Diplomacy*

Terdapat dua alasan utama bagi Jepang mengapa diplomasi publik menjadi suatu langkah penting bagi kepentingan luar negeri Jepang.[33] Pertama, tentang penguatan diplomasi publik di negara lain selama tiga dekade terakhir. Jepang memandang telah muncul persaingan di antara negara-negara maju untuk mengembangkan kekuatan lunak (*soft power*) mereka dalam membangun hubungan bilateral maupun multilateral di kancah internasional. Dapat dikatakan bahwa persaingan ini juga dapat dipandang sebagai persaingan untuk mendapatkan citra positif tentang negaranya dan menarik perhatian bagi negara-negara lain. Kedua, berkaitan munculnya kekuatan baru di Asia di dekade terakhir yang diwujudkan dengan peningkatan kekuatan Tiongkok dan India di satu sisi, namun di sisi yang lain terjadi penurunan kekuatan dan pengaruh Jepang di negara lain.[34] Padahal, di Asia Jepang telah dipandang negara maju dan memiliki posisi yang kuat di dunia internasional karena kekuatan ekonominya.

---

[33] Hall, Ian, and Smith, Frank, 2013, *"The Struggle for Soft Power in Asia: Public Diplomacy and Regional Competition"*. Asian Security. Volume 9, No. 1. http://dx.doi.org/10.1080/14799855.2013.760926 hal. 2, diakses pada tanggal 14 April 2014

[34] Ibid, hal. 7

Grafik 1. Grafik Pendapatan Nasional per Kapita (GNP) Negara G8 + Tiongkok dan India 1960-2010

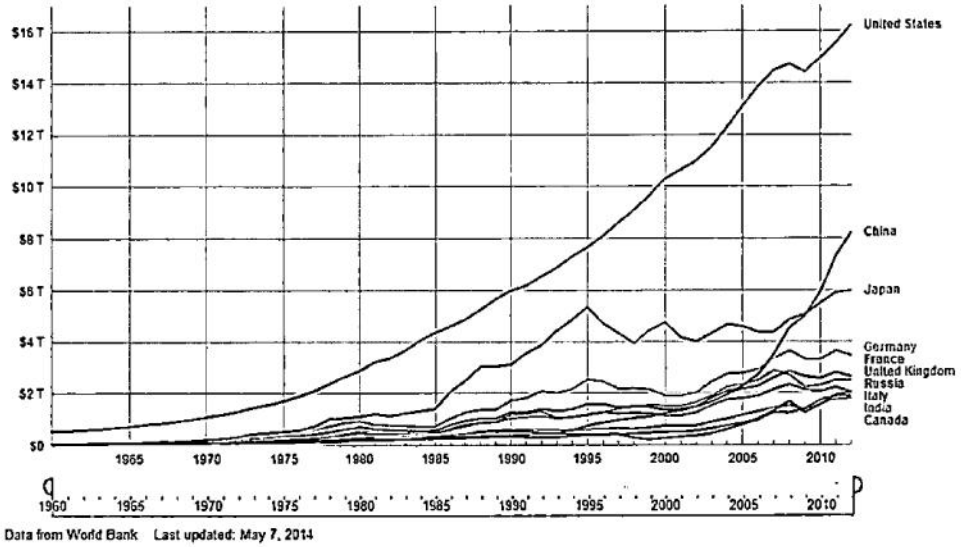

sumber: World Economic Growth Statistics, World Bank 2013

Berdasarkan grafik diatas, pada akhir 1970-an sampai 2000-an kemajuan di bidang ekonomi membuat Jepang menikmati kekuatan ekonominya yang telah membawanya menduduki posisi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun pada akhir tahun 1990-an, keunggulan ekonomi Jepang mulai mengalami penurunan (lihat tabel di bawah). Jepang dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Sedangkan di sisi yang lain, pasca reformasi oleh Deng Xiaoping di akhir 1970-an, Tiongkok perlahan mengalami peningkatan kekuatan ekonominya. Di saat Jepang mengalami penurunan kekuatan ekonomi

pada akhir tahun 1990-an, Tiongkok justru mengalami yang sebaliknya.[35] Ekonomi Tiongkok tumbuh sangat pesat dan mengalami perkembangan yang luar biasa. Industri Tiongkok telah tersebar di seluruh penjuru dunia dengan berbagai kegiatan bentuk investasi yang dilakukan dan didukung oleh pemerintah Beijing. Di saat yang sama, India juga tumbuh sebagai kekuatan ekonomi lain di Asia dan selama beberapa dekade terakhir ekonomi India mengalami perkembangan yang positif.

Grafik 2. Grafik Pendapatan Nasional per Kapita (GNP) Jepang, Tiongkok dan India (1960-2010)

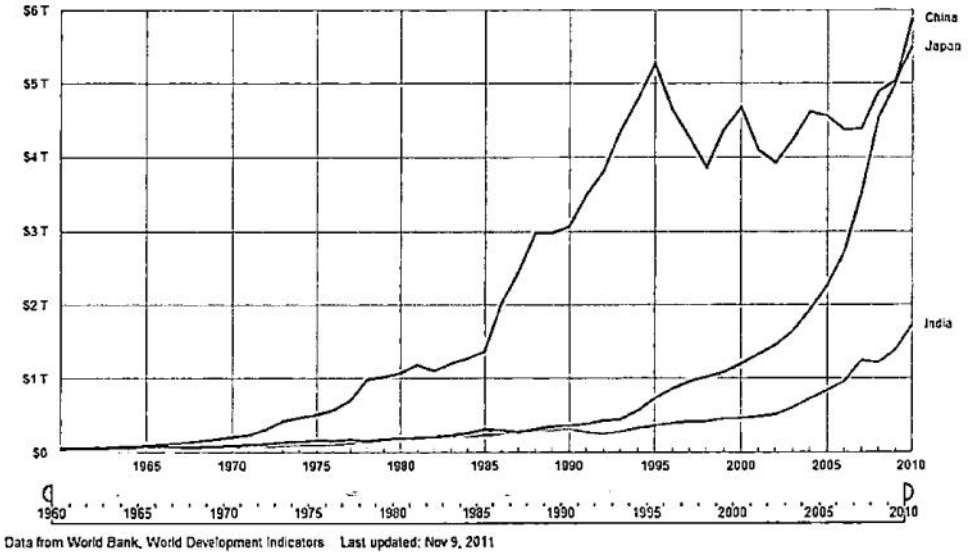

sumber: World Economic Growth Statistics, World Bank 2013

[35] Ibid, hal. 8

Pandangan masyarakat internasional tentang citra Jepang sebagai negara maju pun relatif menurun. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang yang dirilis pada tahun 2009[36], jajak pendapat yang dilakukan dari tahun 2000 sampai 2009 di Amerika Serikat kepada 1500 orang dari kelompok publik dan 253 orang dari kelompok *opinion leaders*, publik di Amerika Serikat memandang bahwa Jepang masih menempati urutan pertama sebagai negara yang paling penting bagi Amerika Serikat dan semua negara ASEAN dengan respons sekitar 43%-46%. Dalam jajak pendapat yang sama juga menunjukkan bahwa publik menganggap bahwa Tiongkok juga akan segera menuju posisi yang dimiliki oleh Jepang, yaitu sebagai negara yang memiliki peran paling penting dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan peningkatan persentase dari 22% di tahun 2000 menjadi 46% pada tahun 2009.

Penurunan kekuatan Jepang juga terjadi di negara-negara ASEAN.[37] Pada tahun 2008, Tiongkok menjadi negara mitra paling penting bagi ASEAN dan

---

[36] Public Planning Division, *2009 US Image of Japan Study*, Public Diplomacy Department, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/survey/ diakses pada 16 April 2014

[37] *The Japan-ASEAN Plan of Action*, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/ diakses pada 17 April 2014

Jepang menempati posisi kedua, kemudian India di posisi ketiga. Studi tentang Jepang di Amerika Serikat dan Eropa juga mengalami penurunan.[38] Di Amerika Serikat, dari kurun waktu 1995 sampai dengan tahun 2005, jumlah program atau lembaga pengkajian studi tentang Jepang mengalami penurunan sekitar 25% dari 247 menjadi 184. Jumlah peneliti yang mengkaji tentang Jepang juga mengalami penurunan dari 1,552 peneliti menjadi 1,285 peneliti. Di Eropa Barat, jumlah program atau lembaga pengkajian tentang Jepang juga mengalami penurunan dari 334 lembaga menjadi hanya 147 lembaga atau turun sekitar 56% dalam kurun waktu 1999 sampai dengan tahun 2007.[39] Jumlah peneliti tentang Jepang juga mengalami penurunan dari 1,291 peneliti menjadi 832 peneliti atau mengalami penurunan sebesar 35%. Di Eropa Timur sendiri fenomena yang sama juga terjadi.[40] Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, jumlah program dan lembaga pengkajian tentang Jepang juga mengalami penurunan dari 94 lembaga menjadi 45

---

[38] *Nihongo Kyouiku Kunibetsu Jouhou: USA - 2009,* http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2009/usa.html diakses pada 17 April 2014

[39] *Nihongo Kyouiku Kunibetsu Jouhou: France - 2009,* http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2009/france.html diakses pada 17 April 2014

[40] *Nihongo Kyouiku Kunibetsu Jouhou: Russia - 2009,* http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2009/russia.html diakses pada 17 April 2014

lembaga atau turun sekitar 52% dan jumlah peneliti tentang Jepang menurun dari 130 peneliti menjadi 149 peneliti atau turun sekitar 58%.[41]

Di Amerika Serikat, jumlah orang yang belajar bahasa Jepang juga mengalami penurunan.[42] Pembelajar bahasa Jepang di Amerika Serikat menurun dalam rentang waktu 2003 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2003 pembelajar bahasa Jepang berjumlah 140,200 orang dan pada tahun 2006 berkurang menjadi 117,969 orang atau menurun sekitar 15%. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari tahun 1997 sampai 2007, jumlah media dan koresponden asing di Tokyo juga mengalami penurunan.[43] Pada tahun 1997 terdapat sekitar 295 media asing dan 450 koresponden asing di Tokyo, namun pada tahun 2007, hanya terdapat 199 media asing atau mengalami penurunan sebesar 32% dan untuk koresponden asing sekitar 283 orang atau menurun sebesar 37%. Sebagai perbandingan, di Beijing sendiri, pada tahun 2004 jumlah media dan koresponden asing lebih kecil jumlahnya daripada yang ada di Tokyo pada tahun 1997, yaitu berjumlah 210 media asing dan

---

[41] *Nihongo Kyouiku Kunibetsu Jouhou: Russia - 2009*, loc. cit.

[42] *Nihongo Kyouiku Kunibetsu Jouhou: USA - 2009*, loc.cit.

[43] *Facts and Figures in Japan: Mass Media*, http://fpcj.jp/en/useful-en/facts-en/p=10259/ diakses pada 17 April 2014

315 koresponden asing.[44] Namun pada tahun 2007, jumlah ini meningkat menjadi 278 media asing atau meningkat sebesar 24% dan jumlah koresponden asing juga meningkat menjadi 510 orang atau meningkat sebesar 38%.

Penurunan figur Jepang dan kebangkitan Tiongkok membuat Jepang mau tidak mau berpikir untuk meningkatkan ataupun menguatkan kegiatan diplomasi publiknya. Kementerian Luar Negeri Jepang (*Ministry of Foreign Affairs*—MOFA) mengambil kebijakan dengan mengadakan beberapa program untuk menarik perhatian masyarakat di negara lain. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan citra positif, meningkatkan saling kepercayaan dan saling pengertian kepada Jepang dan masyarakat Jepang. MOFA melaksanakan beberapa program, seperti penggunaan budaya tradisonal maupun budaya pop Jepang sebagai alat publikasi tentang Jepang, serta mempromosikan studi tentang Jepang dan bahasa Jepang di negara-negara lain.[45] Usaha-usaha ini secara tidak langsung akan dapat membangun pandangan positif dari opini publik terhadap Jepang, dan lebih jauh lagi akan dapat meningkatkan pengaruh tentang Jepang kepada para pemimpin

---

[44] *Facts and Figures in Japan: Mass Media*, loc. cit.

[45] *Ministry of Foreign Affairs of Japan: Public Diplomacy,* http://www.mofa.go.jp/policy/culture/public_diplomacy.html diakses pada 18 April 2014

opini untuk membangun hubungan luar negeri yang lebih baik lagi dengan Jepang. Hal ini adalah salah satu bagian dari promosi untuk meningkatkan ketertarikan dan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan negara Jepang. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah keterlibatan dalam agenda global dengan kerjasama yang semakin dekat dengan cara melibatkan komunitas intelektual global yang berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan penurunan figur Jepang.

2. Bentuk Diplomasi Publik Jepang

Diplomasi publik Jepang memiliki beberapa bentuk. Diplomasi ini menggunakan perangkat politik luar negeri yang terdiri atas tiga kategori.[46] Ketiga kategori tersebut adalah:

1. Menggunakan perangkat kebijakan luar negeri
2. Keterlibatan pelajar, mahasiswa dan akademisi
3. Menggunakan unsur-unsur publik

Pertama, dengan menggunakan perangkat kebijakan luar negeri, seperti penyebaran informasi tentang kebijakan Jepang, program yang mengundang

[46] Kazuo Ogura, *"Japan's Cultural Diplomacy, Past and Present"*, Tokyo: Aoyama Gakuin University Press, hal 48-49

politisi atau tokoh dari negara lain serta program pertukaran tenaga ahli dan intelektual. Kategori ini memiliki target yang jelas, yaitu para pengambil kebijakan, pemimpin opini dan kelompok intelektual negara lain. Kategori yang kedua adalah program yang melibatkan pelajar ataupun mahasiswa melalui program pertukaran, seperti JET. Program ini memfokuskan diri pada pembinaan dan pelatihan calon-calon pemimpin di masa depan. Kategori ketiga adalah dengan menggunakan unsur-unsur publik seperti bahasa Jepang, pertukaran budaya, informasi tentang masyarakat, serta kerjasama dalam bidang sosial lainnya. Target utama dari kategori ketiga ini adalah para generasi muda dan masyarakat umum. Implementasi dari program kategori ketiga ini oleh Kemernterian Luar Negeri adalah seperti peringatan 200 tahun hubungan Jepang dan Meksiko pada 1988, 50 tahun hubungan Jepang-Indonesia pada 2008, serta menetapkan tahun 2010 sebagai tahun hubungan persahabatan Jepang-Turki. Usaha lain yang dilakukan antara lain dengan mempublikasikan informasi-informasi tentang Jepang melalui majalah maupun portal situs internet seperti *Web Japan* dan sebagainya..

Web Japan sendiri merupakan situs portal internet yang disponsori oleh MOFA dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang Jepang kepada

masyarakat dunia.[47] Portal *Web Japan* sendiri dapat diakses di http://web-japan.org/. *Web Japan* menurut situs resminya merupakan salah satu situs tentang Jepang paling populer dunia dengan sekitar 300 juta akses per tahunnya dari seluruh dunia. *Web Japan* menyediakan informasi-informasi tentang Jepang berkualitas tinggi dengan sumber-sumber terpercaya. Informasi yang disediakan pun terdiri atas bermacam-macam tema, termasuk gaya hidup, budaya, sosial, sejarah, bahkan lingkungan di Jepang. *Web Japan* juga menyediakan laman khusus tentang fakta-fakta terkini tentang Jepang. Portal situs *Web Japan* secara umum tersedia dalam bahasa Inggris, namun lebih dari sebagian konten situs juga tersedia dalam bahasa lain seperti Mandarin, Spanyol, Prancis, Arab, Korea, Belanda, Portugis dan Rusia.

Dengan menggunakan ketiga bentuk diplomasi publik di atas, yang menggunakan perangkat kebijakan luar negeri dengan melibatkan pembuat keputusan maupun para pemimpin opini, lalu menggunakan peran pelajar, mahasiswa dan akademisi, kemudian menggunakan unsur-unsur publik seperti kebudayaan ; Jepang melakukan kegiatan diplomasi publik yang digagas oleh pemerintahnya, sesuai dengan konsep *heart-to-heart relations* yang dalam *Fukuda*

---

[47] *About Web Jap*an, http://web-japan.org/plaza/about.html diakses pada 16 April 2014

Doctrine yang dicetuskan oleh Takeo Fukuda. Ketiga bentuk diplomasi publik tersebut menjadi penentu pola kebijakan luar negeri Jepang dalam menentukan diplomasi publiknya, dalam upaya menjadikan Jepang sebagai negara yang bersahabat bagi negara-negara lain, tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga dalam bidang sosial dan kebudayaan.